Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Kolaborasi Anti-Banjir yang Tak Kunjung Hadir

Dinas Sumber Daya Air justru menggunakan anggaran pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan sungai dan waduk.

Fransisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir di Ibu Kota masih terhambat. Pembuatan tanggul pesisir Jakarta dan sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur belum akan berlanjut tahun ini.

Dinas Sumber Daya Air, yang akan mendapat anggaran dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur—badan usaha milik negara untuk pembiayaan infrastruktur—pun tak memasukkan proyek konstruksi tanggul pesisir dalam rencana kerja 2020. "Tahun ini belum ada pekerjaan konstruksi, masih tahap perencanaan (Rp 5 miliar). Tahun depan, baru pengerjaan dengan anggaran Rp 50 miliar," kata Kepala Dinas SDA, Juaini Yusuf, kemarin.

Proyek Terpadu Tanggul Pesisir Ibu Kota atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) mulai mangkrak saat Gubernur Anies Baswedan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dua tahun lalu. Keputusan tersebut membuat perusahaan swasta dan badan usaha milik negara pemilik pulau reklamasi hengkang dari kewajiban membangun tanggul pesisir pantai di muka wilayahnya. Padahal total kewajiban pembangunan tanggul swasta dan BUMN mencapai 33,5 kilometer dari target NCICD fase pertama, yaitu 46,2 kilometer.

Tahun lalu, DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum sepakat membagi dua tanggung jawab pembangunan tanggul tersebut. Pemerintah provinsi mengerjakan tanggul tambahan sepanjang 22,4 kilometer, sedangkan Kementerian PUPR sepanjang 11,1 kilometer. Pada 2019, kedua pihak berjanji menuntaskan proyek pada pertengahan 2020 dan awal 2021.

Menurut Juaini, tahun ini Dinas Sumber Daya Air berfokus pada sederet program penanganan banjir lain yang akan menghabiskan anggaran Rp 1,72 triliun dari Rp 12,8 triliun pinjaman DKI ke PT Sarana Multi. Berdasarkan paparannya, Dinas mengajukan Rp 183,3 miliar untuk pembangunan polder, Rp 111 miliar guna revitalisasi pompa, Rp 229,2 miliar buat pembangunan waduk, Rp 552 miliar untuk peningkatan kapasitas sungai, Rp 750 miliar untuk sumur resapan, dan Rp 1,6 miliar buat sistem informasi banjir. "Totalnya Rp 5,29 triliun untuk 2020-2022," ujarnya. Sebanyak Rp 2,83 triliun pinjaman cair pada tahun depan, dan Rp 744,3 miliar pada tahun berikutnya.

Di tengah Jakarta, pembangunan sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur juga belum menunjukkan hasil. Padahal Dinas Sumber Daya Air sempat mengklaim, persoalan pembebasan lahan di lokasi proyek yang akan dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC) tersebut akan tuntas pada April lalu. "Targetnya sebelum akhir semester dua 2020," kata Juaini.

Nyatanya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan proyek ini baru masuk tahap sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, masih menyisakan banyak tahap, dari pendataan lokasi proyek, konsultasi publik, hingga penetapan lokasi. Dia menyatakan Balai Kota terus berupaya meyakinkan warga yang terkena dampak proyek bahwa kompensasi dari pemerintah tidak akan merugikan mereka. "Sodetan ini bisa mengurangi beban banjir hingga 60 meter kubik per detik dengan mengalirkannya ke Kanal Banjir Timur," kata Riza.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Balai Besar Ciliwung-Cisadane Bambang Hery dan pengurus NCICD Kementerian Pekerjaan Umum belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikirim *Tempo*. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, Balai Besar belum bisa berbuat banyak terhadap proyek sodetan karena DKI urung menuntaskan penetapan lokasi dan pembebasan lahan. Hal ini jugalah yang membuat Balai Besar akhirnya mengirim surat nomor PW.03.02-Ay/939 pada Maret lalu. DKI kemudian menggelar sosialisasi proyek sodetan ke warga RW 04 dan 14 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, pada akhir Juli lalu.

Direktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, mengatakan pemerintah pusat sudah menuntaskan pembangunan tanggul pesisir sepanjang 4,83 kilometer dari jatah 11,1 kilometer. Dia mengklaim pemerintah akan segera menuntaskan proyek tanggul yang secara keseluruhan akan mencapai 120 kilometer tersebut. "Kami hanya butuh menyelesaikan 6,17 kilometer (NCICD fase 1)," kata dia.

● FRANSISCO L IMAM HAMDI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Kolaborasi Anti-Banjir yang Tak Kunjung Hadir

Taktik Mengusir Bah

Di tengah cekikan keuangan akibat pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program penanggulangan banjir. Tahun ini, Dinas Sumber Daya Air bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah akan menuntaskan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir, yang diprediksi terjadi mulai akhir 2020.

■ **Polder Pengendali Banjir**
Rencana: 47 polder
Kondisi saat ini:
- Sudah terbangun: 31 polder
- Butuh peningkatan: 10 polder
- Belum terbangun: 6 polder

Target tahun ini: 3 polder krusial akan dibangun (Muara Angke, Kelapa Gading, dan Teluk Gong)

■ **Pompa Mobil**
Target tahun ini:
- 19 unit kekuatan 500 liter per detik
- 13 unit kekuatan 300 liter per detik

■ **Pompa Pengendali Banjir**
Kondisi saat ini:
- Milik pemerintah: 102 unit di 30 lokasi
- Milik pemprov: 382 unit di 148 lokasi

Target tahun ini: revitalisasi pompa karena tak ada anggaran mengganti dengan yang baru

■ **Pembangunan Waduk**
Kondisi saat ini:
- Sudah dibangun: 55,07 hektare
- Belum dibangun: 16,34 hektare

Target tahun ini:
- Waduk Pondok Rangon
- Waduk Brigif
- Waduk Lebak Bulus

■ **Peningkatan Kapasitas Sungai**
Target tahun ini: pengerukan sedimen di 13 sungai hingga 11,69 juta meter kubik

■ **Tanggul Pesisir Pantai**
Rencana: 46,2 kilometer
Kondisi saat ini:
- Sudah terbangun: 12,6 kilometer
- Belum terbangun: 33,5 kilometer
  @ Kementerian PUPR: 11,1 kilometer
  @ Pemprov DKI: 22,4 kilometer

Target tahun ini: Belum ada. Masih proses kajian rencana.

■ **Sumur Resapan**
Rencana: 1,18 juta lokasi
Target tahun ini: 300 ribu lokasi

■ **Alat Bantu Pemantau Banjir**
Rencana:
- 5 unit alat pengukur curah hujan
- 13 unit alat pengukur debit air
- 60 unit kamera pengawas atau CCTV

Target tahun ini:
- 10 unit alat pengukur curah hujan
- 13 unit alat pengukur debit air
- 20 unit kamera pengawas

● FRANSISCO ROSARIANS